

LOMBOK TENGAH



# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029



# LOMBOK



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan.

Renstra ini merupakan pedoman strategis lima tahunan bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif dan berbasis data. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya.

Semoga Renstra ini menjadi pedoman efektif dalam pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Lombok Tengah lima tahun ke depan, menuju ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Praya, 7 November 2025

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Lombok Tengah,



**LALU SUNGKUL, S. Pd**  
NIP. 196512311986021085

## DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata .....	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pariwisata (2020–2024) 14	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan .....	20
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah .....	20
2.1.6 Dukungan BUMD dan Kerja Sama Daerah .....	21
2.2 Isu Strategi Daerah .....	21
2.2.1 Potensi Daerah Sesuai Kewenangan Dinas Pariwisata.....	21
2.2.2 Permasalahan Dinas Pariwisata.....	22
2.2.3 Isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang Relevan .....	26
2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional).....	27
2.2.5 Isu Strategis Dinas Pariwisata 2025–2029.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	33
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025–2029 .....	33
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata 2025–2029 .....	34
3.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	36
3.4 Penahapan Renstra PD.....	37

3.5	Arah Kebijakan Renstra PD .....	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....		42
4.1	Uraian Program .....	42
4.2	Uraian Kegiatan.....	47
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	62
4.4	Uraian Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	81
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	83
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	84
BAB V PENUTUP .....		87
5.1	Kesimpulan Substansial .....	87
5.2	Kaidah Pelaksanaan .....	88
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	89
5.4	Penutup .....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		92
GLOSARIUM .....		93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	9
Tabel 2. 2 Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 2. 3 Register Pegawai berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 2. 4 Data Pegawai Dinas Pariwisata.....	10
Tabel 2. 5 Ringkasan Sumber Daya Keuangan 2020–2024.....	12
Tabel 2. 6 Rekap Inventaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah .....	13
Tabel 2. 7 Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020–2024.....	15
Tabel 2. 8 Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020–2024.....	17
Tabel 2. 9 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....	20
Tabel 2. 10 Potensi Daerah Sesuai Kewenangan Dinas Pariwisata.....	22
Tabel 2. 11 Permasalahan Dinas Pariwisata.....	25
Tabel 2. 12 Isu KLHS yang Relevan dengan Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....	27
Tabel 2. 14 Teknik Menyimpulkan Isu strategis Perangkat Daerah .....	30
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2030 .....	37
Tabel 3. 2 Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029.....	38
Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029 .....	39
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ..	45
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .....	51
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 4 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .....	64
Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah .....	81
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .....	83
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .....	85

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata .....	8
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	34
Gambar 3. 2 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	35

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dokumen ini merupakan rencana strategis lima tahunan yang menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMD 2025–2029 dan Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025.

**Visi :** Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Harmonis”

**Misi 3 :** Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

**Tujuan 3:** Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

**Sasaran utama:**

1. Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

**Isu strategis utama:**

- Pemulihan sektor pasca-COVID-19
- Ketergantungan pada wisata alam
- Kualitas SDM dan infrastruktur belum merata
- Pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas
- Keterlibatan masyarakat lokal yang rendah

**Strategi dan kebijakan:**

Fokus pada penguatan kelembagaan, sertifikasi SDM, promosi digital, diversifikasi produk wisata dan ekraf, serta pembangunan desa wisata dan pusat kreativitas lokal.

**Tahapan implementasi:**

Dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2030, dengan target bertambahnya desa wisata tersertifikasi, pelatihan SDM, pengembangan ekraf, dan promosi lintas media.

**Wilayah prioritas:**

Setiap kecamatan memiliki pengembangan tematik, seperti KEK Mandalika (Pujut), wisata budaya dan pantai (Praya Barat), dan ekowisata (Batukliang Utara).

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata daerah. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, tuntutan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta kebutuhan akan perencanaan pembangunan sektor pariwisata yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, termasuk keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisatawan. Dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pengembangan desa-desa wisata, Kabupaten Lombok Tengah diarahkan menjadi salah satu destinasi unggulan berskala internasional. Namun, tantangan terhadap keberlanjutan ekosistem pariwisata, ketahanan terhadap bencana, serta integrasi ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata menjadi dasar perlunya arah kebijakan yang terstruktur.

Visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yaitu "Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan" menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra ini. Renstra Dinas Pariwisata juga bertujuan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD khususnya pada pengembangan pariwisata yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan ekonomi kreatif.

Renstra PD merupakan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Nilai strategis Renstra ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan di bidang kepariwisataan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata kepada publik.

Selanjutnya, penyusunan Renstra ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota Tahun 2026, sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan pembangunan nasional melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dalam konteks urusan pemerintahan bidang pariwisata, outcome Asta Cita yang relevan antara lain adalah :

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah,
- Bertambahnya jumlah desa wisata aktif yang mandiri dan berkelanjutan,
- Terbangunnya destinasi pariwisata berkelas dunia berbasis budaya dan alam lokal,
- Terciptanya lapangan kerja baru melalui integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif,
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM pariwisata lokal,
- Terjaminnya tata kelola pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat.

Dengan mengintegrasikan arah dan outcome Asta Cita tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu merancang strategi dan program yang tidak hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga turut serta dalam pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
3. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 81), yang mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53A Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, tanggal 7 November 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas pembangunan sektor pariwisata yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun;
2. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan sektor pariwisata dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyediakan acuan bagi pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien;
4. Menunjang terwujudnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan sinergitas antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

- Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.

#### **2. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- Menyajikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, struktur organisasi, sumber daya, capaian kinerja, kelompok sasaran

layanan, permasalahan, serta isu strategis dalam pelaksanaan urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

**3. BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- Memuat pernyataan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, strategi pencapaiannya, serta arah kebijakan yang akan dijalankan selama periode Renstra.

**4. BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

- Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, serta keterkaitannya dengan program prioritas pembangunan daerah. Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**5. BAB V: PENUTUP**

- Menyimpulkan substansi penting Renstra, serta memuat kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata**

Eksistensi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Selanjutnya, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

##### **1. Tugas Pokok**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.

##### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

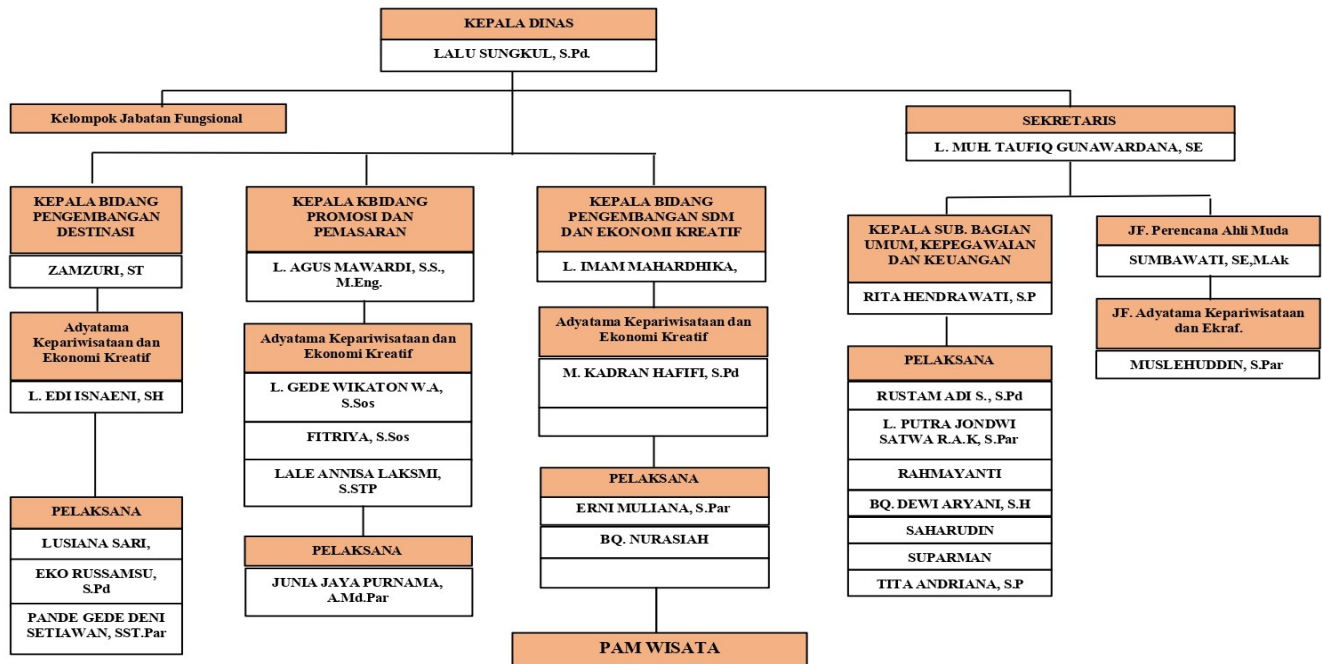
- a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
- b. perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
- d. pelaksanaan perumusan rencana pembangunan di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif;
- f. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Pariwisata;

- g. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
- i. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Dinas;
- k. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pariwisata;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022, struktur organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat (membawahi Subbag Perencanaan, Keuangan, dan Umum/Kepegawaian)
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata
- e. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. UPTD (jika ada, sesuai ketentuan)



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata**

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata *Kabupaten* Lombok Tengah memiliki tiga komponen sumber daya yang saling melengkapi, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan fisik.

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, Dinas Pariwisata *Kabupaten* Lombok Tengah memiliki 55 orang pegawai yang tersebar di berbagai jabatan struktural dan fungsional, dengan komposisi sebagai berikut.

##### a. Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai laki-laki berjumlah 44 orang (80%), sedangkan perempuan berjumlah 11 orang (20%). Pegawai laki-laki umumnya mendominasi unit kerja teknis lapangan, seperti Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang memerlukan mobilitas

tinggi, sedangkan pegawai perempuan lebih banyak pada jabatan administrasi, promosi, dan pengelolaan destinasi.

**Tabel 2. 1 Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretariat	6	7
3	Bidang Promosi	3	2
4	Bidang Destinasi	4	1
5	Bidang SDM	30	1
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>11</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

b. Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mayoritas pegawai memiliki pendidikan SD/SLTP/SLTA sebanyak 34 orang (SD 10 Orang, SLTP 12 orang, SLTA 12 orang), sementara pegawai berpendidikan diploma berjumlah 3 orang (D-3: 3 orang, D-4: 1 orang). Pegawai yang berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 12 orang dan Magister (S-2) sebanyak 5 orang. Komposisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualifikasi pendidikan, khususnya bagi pegawai yang masih berpendidikan menengah, agar mampu mendukung pengelolaan pariwisata secara profesional dan berbasis kompetensi.

**Tabel 2. 2 Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	7	2
3	Bidang Promosi	-	-	-	-	-	1	-	4	1
4	Bidang Destinasi	-	-	-	-	-	1	1	3	1
5	Bidang SDM	10	12	12	-	-	1	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Komposisi Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Sebagian besar pegawai berada di Golongan II (24 orang) dan Golongan III (21 orang), sedangkan Golongan I berjumlah 5 orang dan Golongan IV berjumlah 5 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang

awal hingga menengah dalam karir ASN, sehingga memiliki potensi besar untuk pembinaan dan pengembangan karir.

**Tabel 2. 3 Register Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	9	1
3	Bidang Promosi	-	1	3	1
4	Bidang Destinasi	-	1	3	1
5	Bidang SDM	5	20	5	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>5</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

d. Data Individu Pegawai

Secara rinci, daftar pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. 4 Data Pegawai Dinas Pariwisata**

**Keadaan: 31 Desember 2024**

No.	N A M A	L/P	Gol.	ESLN	JABATAN	PDDKN	DIKLAT PIM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	L.SUNGKUL,S.Pd	L	IV/b	IIb	Kepala Dinas	S1		
2	L. MUH. TAUFIQ GUNAWARDANA, SE	L	IV/a	III.b	Sekretaris Dinas	S1	-	
3	L. AGUS MAWARDI, SS, M. Eng.	L	IV/a	III.b	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran	S2	PIM III	
4	Drs. L. ZAMZURI, MM	L	IV/a	-	Staf	S2	PIM III	
5	ZAMZURI, ST	L	III/d	III.b	Kabid. Pengemb. Destinasi	S2		
6	L. IMAM MAHARDIKA, S.SlT	L	III/d	III.b	Kabid. Pengemb. SDM dan Ekraf.	S1	-	
7	FITRIYA, S.Sos	P	III/d	-	JF	S1		
8	L GDE WIKATON W.A, S.Sos	L	III/d	-	JF	S1		
9	RITA HENDRAWATI, S.P	L	III/d	IV.a	Kasubbag.	S1		
10	SUMBAWATI, SE, M.Ak.	P	III/d	-	JF	S2	-	
11	TITA ANDRIANA, SP, M.Ak	P	III/d		Fungsional Umum	S2		
12	LALU EDI ISNAENI, SH	L	III/c	-	JF	S1		
13	M. KADRAN HAFIFI, S.Pd	L	III/c	-	JF	SI		
14	L. PUTRA JONDWI S, A.Md.Par	L	III/b	-	Staf	D3		
15	MUSLEHUDDIN, A.Md. Par	L	III/b	-	JF	D3		
16	LALE ANNISA LAKSMI, S.STP	P	III/b		JF	SI		
17	NURBAYA	P	III/b		Fungsional Umum			
18	RAHMAYANTI	P	III/a	-	Staf	SMK		
19	EKO RUSSAMSU, S.Pd	L	III/a	-	Staf	SI		

No.	N A M A	L/P	Gol.	ESLN	JABATAN	PDDKN	DIKLAT PIM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	PANDE GEDE DENI SETIAWAN, SST.Par	L	III/a	-	Staf	D. IV		
21	AHMAD HUZAIRIN	L	III/a	-	Staf	SLTA		
22	ERNI MULIANA, S.Par	P	III/a	-	Staf	SI		
23	RUSTAM ADI SUCIPTO, S.Pd	L	III/b		Staf	S1		
24	L. SUHARJE	L	II/d	-	Staf	SMA		
25	WIRJAYADI	L	II/d		Staf	SMA		
26	MARYUNANI	L	II/d	-	Staf	SMA		
27	NURSAMADA	L	II/d	-	Staf	SMA		
28	BAIQ DEWI ARIYANI	P	II/d	-	Staf	SLTA		
29	JUNIA JAYA PURNAMA, A.Md.Par	L	II/c	-	Staf	D3		
30	LUSIANAN SARI	P	II/c	-	staf	D3		
31	SAHARUDIN	L	II/c		Staf	Paket C		
32	BQ NURASIAH	L	II/b	-	Staf	Paket C		
33	WIDAGDE	P	II/b		Staf	SMA		
34	SEKAR	L	II/b	-	Staf	SMP		
35	L. ZAENUDIN	L	II/b	-	Staf	SMP		
36	L. AKMAL	L	II/b	-	Staf	SMP		
37	L. NURSALAM	L	II/b	-	Staf	Paket C		
38	L. MULYADI	L	II/b	-	Staf	SMP		
39	L. ADNAN	L	II/b	-	Staf	SMP		
40	L. ALIMAH SAMSUDIN	L	II/b	-	Staf	SMP		
41	L. EDI TURMUZI	L	II/b	-	Staf	Paket B		
42	JOLI WIRAPATONI	L	II/a	-	Staf	Mts		
43	M. ARSIL	L	II/a	-	Staf	SMP		
44	L. SUGATRAH	L	II/a	-	Staf	SD		
45	SUPARMAN	L	II/a	-	Staf	SD		
46	LAHIR	L	I/d	-	Staf	SD		
47	HASBOLLAH	L	I/d		Staf	SD		
48	MERPE	L	I/d	-	Staf	SD		
49	SUKUR	L	I/d	-	Staf	SD		
50	DEMUNG	L	I/d	-	Staf	SD		
51	L. PUTRADI	L	I/d	-	Staf	SMP		
52	ZULHADI	L	I/c	-	Staf	SMP		
53	ZAENUDIN	L	I/c	-	Staf	SD		
54	L. NURHADI	L	I/c	-	Staf	SD		
55	L. SAYUTI	L	I/a	-	Staf	SD		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

#### e. Analisis Singkat

Dominasi Pegawai Laki-laki, dimana potensi kekuatan di bidang lapangan, namun memerlukan keseimbangan gender untuk unit pelayanan publik dan kreatif. Tingkat Pendidikan, mayoritas masih pendidikan menengah (SLTP/SLTA) sehingga perlu peningkatan kapasitas formal dan nonformal. Kepangkatan,

Mayoritas di Golongan II, membuka peluang percepatan karir dan peningkatan jabatan struktural/fungsional.

Dengan komposisi ini, fokus pembinaan SDM ke depan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis, pemerataan kualifikasi pendidikan, serta peningkatan profesionalisme aparatur guna mendukung terwujudnya pariwisata Lombok Tengah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Pembiayaan program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah, dengan dukungan signifikan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik Bidang Pariwisata, serta Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel 2. 5 Ringkasan Sumber Daya Keuangan 2020–2024**

Tahun	Total Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Sumber Dana Dominan	Program Utama yang Didanai
2020	14.474.445.805	APBD Kab. Lombok Tengah, DAK Fisik Pariwisata	Pengembangan Pariwisata, Pengelolaan Budaya, Promosi
2021	18.200.000.000	APBD, DAK Fisik	Pengembangan Destinasi, Pengelolaan Cagar Budaya, Promosi
2022	27.200.000.000	APBD, DAK, Dana Transfer Umum	Pengembangan Kebudayaan, Destinasi, Pemasaran
2023	23.400.000.000	APBD, Dana Transfer Khusus & Umum	Destinasi, SDM & Ekraf, Pemasaran
2024	17.230.000.000	APBD, DAK Fisik & Non-Fisik	Destinasi, Promosi, Fasilitas Kelembagaan

Rata-rata alokasi anggaran selama lima tahun terakhir adalah sekitar Rp20,10 miliar per tahun.

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang erat kaitannya dengan kondisi fiskal daerah dan kebijakan nasional di bidang pariwisata. Tahun awal pandemi (2020) menandai penurunan signifikan akibat refocusing anggaran, sementara tahun 2022 menjadi puncak alokasi karena dukungan DAK Fisik dan kegiatan strategis internasional di KEK Mandalika.

Setelah itu, terjadi penyesuaian anggaran pada 2023–2024 dengan fokus pada efisiensi dan optimalisasi program prioritas, terutama pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif.

Secara umum, kecenderungan lima tahun terakhir menunjukkan bahwa:

- Dukungan DAK Fisik dan Non-Fisik menjadi faktor dominan dalam pembiayaan program strategis;
- Perubahan struktur anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (pandemi, event nasional, kebijakan fiskal);
- Rata-rata alokasi anggaran Rp20,10 miliar per tahun masih relatif terbatas untuk mendukung transformasi sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk periode perencanaan 2025–2029, arah kebijakan pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada:

- a. Diversifikasi sumber pendanaan melalui sinergi dengan sektor swasta dan program lintas OPD;
- b. Optimalisasi pemanfaatan DAK dan dana transfer lainnya untuk kegiatan berbasis hasil (outcome-based); dan
- c. Efisiensi belanja publik dengan mengutamakan program berdaya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.

### 3. Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah merupakan aset barang milik daerah yang menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif. Data ini bersumber dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk aset tanah dan KIB C untuk aset bangunan/gedung, yang telah disesuaikan dengan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) per tahun 2024.

**Tabel 2. 6 Rekap Inventaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Luas Total	Lokasi	Keterangan Fungsi
1	Tanah (KIB A)	6 bidang	± 83.972 m <sup>2</sup>	Desa Rembitan (Pujut), Jl. Ahmad Yani (Praya), Aik Bukak (Batukliang Utara)	Lokasi kantor, taman wisata, sarana olahraga
2	Gedung Kantor	± 45	Variatif	Kantor Dinas Pariwisata,	Layanan

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Luas Total	Lokasi	Keterangan Fungsi
	& Balai Pertemuan	unit		Bencingah Praya, Balai Desa Wisata Lantan, Balai Desa Rembitan	administrasi & pertemuan
3	Fasilitas Wisata (Toilet, Musholla, Ruang Ganti)	± 50 unit	Variatif	Pantai Seger, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Aik Bukak, Benang Kelambu, Are Guling, Mawi	Kenyamanan wisatawan
4	Kios & Pusat Kuliner	± 15 unit	Variatif	Plaza Kuliner Jl. Ahmad Yani, Pusat Kuliner Aik Bukak, Kios Cinderamata Are Guling, Selong Belanak, Mawun, Lantan	Mendukung ekonomi kreatif lokal
5	Fasilitas Hiburan & Event	± 5 unit	Variatif	Panggung Terbuka Pantai Seger, Plaza Jajanan Desa Lantan, Panggung Kesenian Praya	Event & atraksi wisata
6	Fasilitas Olahraga & Rekreasi	3 unit	Variatif	Kolam Renang Aik Bukak, Kolam Pemandian Benang Kelambu	Rekreasi & olahraga wisata
7	Fasilitas Pendukung	± 40 unit	Variatif	Pos Jaga di destinasi wisata, Pagar Pembatas Aik Bukak, Menara Pandang Desa Lantan, Lampu Taman Aik Bukak	Keamanan, estetika, dan kenyamanan

Sumber: KIB A & KIB C Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, BKAD 2024

Aset fisik ini tersebar di berbagai destinasi wisata unggulan, pusat kegiatan ekonomi kreatif, serta lokasi strategis perkantoran. Fasilitas yang tersedia tidak hanya mendukung operasional internal Dinas Pariwisata, tetapi juga menunjang kenyamanan wisatawan, mendukung event pariwisata, dan mendorong perkembangan usaha masyarakat lokal. Ke depan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset perlu menjadi prioritas agar nilai manfaatnya dapat terus meningkat.

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pariwisata (2020–2024)

Urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.

Peraturan ini merupakan dasar hukum terakhir yang secara eksplisit menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pariwisata dan masih berlaku pada periode perencanaan Renstra 2025–2029. Dalam kurun waktu 2020–2024, penyelenggaraan urusan pariwisata difokuskan pada peningkatan daya tarik destinasi, promosi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan kapasitas SDM pariwisata. Pelaksanaan kinerja pelayanan publik tersebut dievaluasi melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

### 2.1.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata

**Tabel 2. 7 Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020–2024**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	825,05	160,84	126,83
2	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	%	66,49	69,89	3,28
3	Tingkat hunian akomodasi	%	13,50	25,90	50,00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,67	1,27	1,34
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,96	24,09	14,47

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sektor pariwisata Tahun 2022–2024, kinerja pembangunan pariwisata menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi permintaan wisatawan, pemanfaatan akomodasi, maupun kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada Tahun 2022 tercatat sangat tinggi, yang mencerminkan efek pemulihan pascapandemi dan terbukanya kembali akses perjalanan internasional. Pada Tahun 2023 dan 2024, persentase pertumbuhan mengalami penurunan, namun masih berada pada tingkat yang positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan wisatawan mancanegara mulai bergerak menuju fase normalisasi setelah lonjakan awal pemulihan.

Persentase peningkatan wisatawan nusantara menunjukkan tren meningkat pada Tahun 2022 dan 2023, yang menandakan tingginya mobilitas wisatawan domestik. Namun, pada Tahun 2024 terjadi perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi pemasaran dan pengembangan produk wisata yang lebih beragam guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan wisatawan nusantara.

Tingkat hunian akomodasi menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2022–2024. Kenaikan tingkat hunian tersebut mencerminkan meningkatnya pemanfaatan fasilitas akomodasi seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan. Meskipun demikian, optimalisasi tingkat hunian masih perlu ditingkatkan melalui pengaturan pola kunjungan dan penguatan daya tarik destinasi.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2023 dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan nilai tambah ekonomi daerah secara stabil, sehingga diperlukan penguatan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada Tahun 2023, namun mengalami penurunan pada Tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti kebijakan pemungutan, struktur retribusi dan pajak daerah, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, diagnosis kinerja menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan pariwisata terletak pada stabilitas dan keberlanjutan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan keuangan daerah, meskipun indikator permintaan wisatawan dan pemanfaatan akomodasi menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kualitas kunjungan, penguatan nilai tambah ekonomi lokal, serta optimalisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara berkelanjutan.

**Tabel 2. 8 Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas  
Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020–2024**

	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	44.459	41.156	104.883	209.008	325.089
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Tingkat hunian kamar akomodasi	%	12,67	16,00	26,00	26,00	38,36
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,02	1,00	1,25	1,27	1,34
5	Nilai Tambah Ekraf	Rupiah (Milyar)	557,15	600,36	667,20	734,33	801,31
6	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen			81,79	21,90	52,70

### **Analisis Deskriptif dan Diagnosis Kinerja**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020–2024, secara umum kinerja pembangunan pariwisata menunjukkan kecenderungan membaik setelah mengalami penurunan pada masa pandemi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2024, yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas pariwisata serta meningkatnya minat kunjungan ke destinasi wisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Rata-rata lama tinggal wisatawan selama periode 2020–2024 relatif tidak mengalami perubahan, yaitu berada pada kisaran 3 hari. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan daya tarik produk dan aktivitas pariwisata yang mampu mendorong wisatawan untuk memperpanjang masa tinggalnya.

Dengan demikian, potensi peningkatan belanja wisatawan dan perputaran ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Tingkat hunian kamar akomodasi menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Meskipun demikian, tingkat hunian kamar tersebut masih berada pada tingkat yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan kapasitas akomodasi yang tersedia, sehingga masih terdapat peluang peningkatan pemanfaatan fasilitas akomodasi melalui penguatan pola kunjungan dan distribusi wisatawan.

Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB daerah, yang tercermin dari rasio PDRB sektor tersebut, menunjukkan peningkatan secara bertahap dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Namun demikian, kontribusi tersebut masih relatif kecil dalam struktur perekonomian daerah, sehingga peran sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya.

Nilai tambah ekonomi kreatif selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif di daerah. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi ekonomi kreatif sebagai pendukung pengembangan pariwisata dan sumber penciptaan nilai tambah ekonomi daerah. Namun, integrasi antara ekonomi kreatif dengan pengembangan destinasi dan aktivitas pariwisata masih perlu dioptimalkan agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kinerja pariwisata.

Selanjutnya, persentase investasi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa iklim investasi di sektor pariwisata belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur pendukung, serta dinamika permintaan pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat didiagnosis bahwa tantangan utama pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah terletak pada peningkatan kualitas dan nilai tambah pariwisata, bukan semata-mata pada peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan strategi pengembangan produk dan destinasi pariwisata, peningkatan keterpaduan ekonomi kreatif dengan pariwisata, optimalisasi pemanfaatan akomodasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Kinerja output menunjukkan peningkatan capaian yang konsisten di seluruh indikator, khususnya pada jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi subsektor pariwisata. Kinerja pelayanan publik pariwisata mengalami pemulihan cepat pasca pandemi dan meningkat signifikan sejak 2022

Meskipun capaian kinerja pembangunan pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain ketergantungan pada aktivitas pariwisata berskala besar serta belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata secara berkelanjutan. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata masih perlu diperkuat guna memastikan bahwa capaian output pembangunan pariwisata dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025–2029. Ke depan, fokus pembangunan pariwisata diarahkan pada:

1. peningkatan dan keberlanjutan pertumbuhan kunjungan wisatawan serta tingkat hunian kamar akomodasi;
2. penguatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatan daerah;
3. peningkatan kualitas pengelolaan data dan promosi pariwisata berbasis digital; dan
4. penguatan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif lokal dalam pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

**Tabel 2. 9 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

No	Kelompok Sasaran	Uraian Pelayanan	Data Kuantitatif (Baseline 2024)	Sumber Data
1	Wisatawan domestik dan mancanegara	Penyediaan destinasi, event, promosi, keamanan, dan kenyamanan wisata	1.820.000 wisatawan (1.620.000 domestik, 200.000 mancanegara)	Statistik Kunjungan Wisatawan – Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah 2024
2	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembinaan, sertifikasi usaha, fasilitasi promosi, dan kemitraan	± 450 pelaku usaha pariwisata dan ekraf terdaftar	Data Registrasi Usaha Pariwisata & Ekraf – Dinas Pariwisata 2024
3	Masyarakat lokal di kawasan destinasi	Pemberdayaan masyarakat, pelatihan, fasilitasi usaha, dan pendampingan	± 75.000 jiwa di desa wisata & desa penyangga	BPS Kab. Lombok Tengah (Data Desa Wisata & Desa Penyangga, 2024)
4	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pembinaan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan pengelolaan destinasi	48 Pokdarwis aktif	Data Kelembagaan Pokdarwis – Dinas Pariwisata 2024
5	Generasi muda kreatif	Pelatihan, fasilitasi karya, promosi ekraf, dan akses ke pasar digital	± 2.500 pemuda pelaku ekraf	Pendataan Pelaku Ekraf – Dinas Pariwisata 2024
6	Pemerintah Desa & Pelaku UMKM	Pendampingan perencanaan desa wisata, fasilitasi permodalan, promosi produk	120 desa/kelurahan; ± 1.200 UMKM wisata	Bappeda & Dinas Koperasi/UMKM Kab. Lombok Tengah 2024
7	Pengelola dan pengunjung objek wisata	Pelayanan kunjungan, fasilitas, keamanan, dan kebersihan destinasi	67 objek wisata terdaftar (alam, budaya, buatan)	Database Destinasi Wisata – Dinas Pariwisata 2024

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Dinas Pariwisata Provinsi NTB;
3. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Mandalika;
4. Asosiasi pelaku usaha pariwisata;
5. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan;

6. Media dan platform digital promosi wisata.

### **2.1.6 Dukungan BUMD dan Kerja Sama Daerah**

Belum terdapat dukungan BUMD yang spesifik dalam sektor pariwisata di Lombok Tengah. Namun, peluang kolaborasi terbuka melalui kemitraan investasi daerah.

## **2.2 Isu Strategi Daerah**

### **2.2.1 Potensi Daerah Sesuai Kewenangan Dinas Pariwisata**

Kabupaten Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai kawasan unggulan pariwisata nasional, khususnya dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain Mandalika, daerah ini juga memiliki kekayaan alam, budaya, dan produk ekonomi kreatif yang menjadi potensi pengembangan wisata berbasis komunitas dan keberlanjutan. Potensi tersebut meliputi:

1. Destinasi Wisata Alam: Pantai Kuta Mandalika, Pantai Tanjung Aan, Bukit Merese, Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu.
2. Wisata Budaya: Desa Adat Sade dan Rembitan, tradisi Bau Nyale, dan seni tradisional seperti Gendang Beleq dan Peresean.
3. Ekonomi Kreatif: Tenun ikat khas Sasak, kerajinan gerabah, produk olahan makanan lokal, serta seni pertunjukan rakyat.
4. Desa Wisata: Pengembangan desa wisata unggulan seperti Desa Wisata Ende, Desa Sukarara, dan Desa Selong Belanak.
5. Event Strategis: Perhelatan MotoGP, World Superbike (WSBK), dan event budaya yang berskala nasional/internasional.
6. Pelaku dan komunitas pariwisata lokal (Pokdarwis, pelaku homestay, dan UMKM pendukung) yang berperan langsung dalam penyediaan layanan wisata berbasis masyarakat.

Potensi tersebut berada dalam kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk dikelola, dikembangkan, dan dipromosikan secara berkelanjutan sesuai visi pembangunan daerah. Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program strategis, seperti pengembangan destinasi, pelatihan sumber daya manusia pariwisata, fasilitasi desa wisata, penguatan kelembagaan pariwisata, promosi terpadu, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaboratif, potensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata daerah, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan serta warisan budaya untuk generasi mendatang.

**Tabel 2. 10 Potensi Daerah Sesuai Kewenangan Dinas Pariwisata**

Kategori Potensi	Uraian Potensi	Lokasi Utama	Keterangan/Keunggulan
Alam	Pantai berpasir putih (Tanjung Aan, Seger, Selong Belanak, Mawun, Mawi, Are Guling), air terjun (Benang Kelambu, Benang Stokel), kawasan perbukitan	Pujut, Praya Barat, Batukliang Utara	Panorama indah, cocok untuk wisata bahari, selancar, fotografi, dan rekreasi alam
Destinasi Super Prioritas	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Pujut	Infrastruktur internasional, pusat event MotoGP dan ajang olahraga dunia
Budaya	Desa adat (Sade, Rembitan), seni pertunjukan (Gendang Beleq, Tari Tradisional), arsitektur tradisional, upacara adat	Pujut, Jonggat, Praya	Pengalaman budaya autentik, wisata edukasi
Ekonomi Kreatif	Kerajinan tenun ikat, anyaman, ukir kayu, kuliner khas (Ayam Taliwang, Beberuk Terong, Sate Bulayak)	Praya, Jonggat, Pujut, Batukliang	Produk unik bernilai jual tinggi, berbasis kearifan lokal
Desa Wisata	Desa Wisata Ende, Desa Wisata Sade, Desa Wisata Lantan, Desa Wisata Bonjeruk	Pujut, Batukliang Utara, Jonggat	Pengelolaan berbasis komunitas, pengalaman wisata lokal
Event	MotoGP Mandalika, Festival Bau Nyale, event budaya dan olahraga lainnya	Pujut, Praya, Pantai Seger	Menarik wisatawan nasional dan internasional, meningkatkan promosi daerah

### 2.2.2 Permasalahan Dinas Pariwisata

Penyelenggaraan pelayanan bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2020–2024 telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi unggulan nasional. Namun, dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD dan capaian pariwisata di tingkat provinsi maupun

nasional, masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan, baik dari sisi kinerja pelayanan, kapasitas sumber daya, maupun dukungan infrastruktur dan kelembagaan. Permasalahan tersebut dirangkum sebagai berikut:

1. Pemulihan pasca pandemi yang relatif lambat, meskipun sektor pariwisata telah menunjukkan tren pemulihan, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 baru mencapai 1,8 juta orang atau -28% di bawah target 2,5 juta orang. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
2. Minimnya diversifikasi produk wisata, sebesar 70% paket wisata yang ditawarkan masih berbasis alam, sementara kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah masih di bawah 2%. Kondisi ini membatasi daya tarik bagi segmen pasar wisatawan yang menginginkan variasi pengalaman.
3. Infrastruktur pendukung wisata yang belum merata, sebanyak 35% desa wisata belum memiliki akses jalan yang memadai. Hambatan ini menyulitkan mobilitas wisatawan dan membatasi potensi kunjungan ke destinasi-destinasi yang belum berkembang.
4. Rendahnya kualitas sdm pariwisata, sekitar 60% pelaku usaha dan pengelola destinasi belum memiliki sertifikasi kompetensi. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang belum memenuhi standar nasional maupun internasional.
5. Lemahnya pemanfaatan promosi digital, hanya kurang dari 10% wisatawan yang berasal dari kanal pemasaran digital. Potensi pasar online yang sangat besar belum tergarap optimal, mengingat tren wisatawan kini lebih banyak mencari informasi dan melakukan pemesanan secara digital.
6. Pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan, belum adanya sistem pengaturan daya dukung destinasi menyebabkan tekanan terhadap lingkungan di beberapa lokasi wisata, berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem.
7. Manajemen event yang belum optimal, sebagian event tahunan belum berkesinambungan, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan masih terbatas dan belum maksimal dalam menarik wisatawan secara konsisten.

8. Rendahnya partisipasi masyarakat local, sebanyak 40% Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tidak aktif berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi. Akibatnya, potensi pengembangan berbasis komunitas belum sepenuhnya dimanfaatkan.
9. Keterbatasan fasilitas chse di destinasi, sekitar 60% destinasi wisata belum memiliki fasilitas Cleanliness (Tempat sampah yang tersedia dan dipisahkan-kategori (organik, anorganik, limbah khusus), Toilet umum yang bersih, Area cuci tangan; Health (Pos kesehatan / P3K di area destinasi, Petugas terlatih untuk pertolongan pertama (P3K), serta alat dasar seperti kotak P3K, APAR medis ringan; Safety (Jalur evakuasi yang jelas dan ditandai (misalnya di area pantai, tebing, air terjun), Papan rambu peringatan bahaya (ombak kuat, tebing curam, area terlarang), Petugas keamanan / patroli rutin / lifeguard di destinasi yang berisiko (pantai, air terjun, wisata air), Kamera CCTV, Alat pemadam api ringan (APAR) and Environment (Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, Pemeliharaan area terbuka hijau, sanitasi lingkungan (selokan, drainase) agar tidak tercemar atau tergenang (CHSE) yang memadai, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wisatawan.
10. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, tercatat 12 destinasi rawan abrasi pantai (Pantai Kuta Mandalika, Pantai Seger, Pantai Selong Belanak, Pantai Mawun, Pantai Aan / Tanjung Aan, Pantai Mawi, Pantai Gerupuk, Pantai Are Guling, Pantai Tampah, Pantai Semeti, Pantai Tunak, Pantai Lancing) dan 5 destinasi rawan longsor (Air Terjun Benang Stokel, Air Terjun Benang Kelambu, Bukit Merese, Bukit Selong Belanak, Bukit Seger). Kerentanan ini berpotensi mengganggu keberlangsungan aktivitas wisata serta keselamatan pengunjung. Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah, Peta Risiko Abrasi Pesisir (2024), InaRISK BNPB, Peta Risiko Bencana Nasional Versi 4.5 (Update 2024)
11. Rendahnya daya saing pariwisata daerah, Berdasarkan Laporan Daya Saing Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kabupaten Lombok

Tengah berada pada peringkat ke-8 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB (1. Kota Mataram 2. Lombok Barat; 3. Lombok Utara; 4. Sumbawa Barat; 5. Sumbawa; 6. Dompu; 7. Bima; 8. Lombok Tengah; 9. Lombok Timur; 10. Kota Bima). Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun Lombok Tengah memiliki potensi unggulan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, daya saing secara keseluruhan masih di bawah daerah lain seperti Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sementara itu, berdasarkan data proxy tahun 2024 yang disusun dari BPS NTB dan NTB Satu Data, Lombok Tengah menempati posisi ke-3 dari 10 kabupaten/kota (1. Kota Mataram; 2. Lombok Barat; 3. Lombok Tengah; 4. Lombok Utara; 5. Lombok Timur; 6. Sumbawa Barat; 7. Sumbawa; 8. Bima; 9. Dompu; 10. Kota Bima) dalam jumlah kunjungan wisatawan dan ketersediaan fasilitas akomodasi, setelah Kota Mataram dan Lombok Barat. Hal ini menunjukkan peningkatan performa kunjungan, namun masih perlu penguatan dalam aspek kualitas layanan, inovasi produk wisata, promosi digital, dan pemenuhan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment).

Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar penyusunan isu strategis dan perumusan program prioritas pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, agar pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

**Tabel 2. 11 Permasalahan Dinas Pariwisata**

No	Permasalahan	Indikator/Gap Capaian	Dampak
1	Pemulihan pasca pandemi lambat	Kunjungan wisatawan 2024: 1,8 juta vs target 2,5 juta (-28%)	Penurunan pendapatan pariwisata
2	Minim diversifikasi produk wisata	70% paket wisata berbasis alam, 20% paket wisata Budaya & sejarah (desa adat, tenun, kuliner, lokal, ritual, cagar budaya), 10% paket wisata Buatan / rekreasi modern (event, sport tourism, edukasi); kontribusi ekraf < 2% PDRB	Daya tarik terbatas
3	Infrastruktur belum merata	35% desa wisata tanpa akses jalan memadai (dari 40 Desa Wisata yang tercatat, 14 Desa Wisata Desa wisata dengan jalan utama belum beraspal atau rusak berat	Keterbatasan akses wisatawan
4	SDM pariwisata rendah	60% pelaku belum bersertifikat (Total pelaku pariwisata (usaha + individu) = .1250; Pelaku bersertifikat (BNSP, CHSE, pelatihan resmi) = 500; pelaku belum bersertifikat = 750, $750/1.250 \times 100\% =$	Pelayanan tidak standar

		60%)	
5	Promosi digital lemah	Kunjungan dari kanal digital < 10% (Total kunjungan wisatawan Lombok Tengah 2024 = 1.800.000 orang ; Kunjungan melalui kanal digital (media sosial, marketplace, web) = ±160.000 orang; Kunjungan non-digital (word of mouth, biro perjalanan, event) = ±1.640.000 orang) . Kunjungan kanal 160.000 orang dari total 1.800.000 orang = 8.9%≈<10%	Potensi pasar online belum tergarap
6	Pengelolaan lingkungan belum berkelanjutan	Belum ada sistem daya dukung destinasi	Degradasi lingkungan
7	Manajemen event belum optimal	Event tahunan tidak berkelanjutan	Dampak ekonomi kecil
8	Partisipasi masyarakat rendah	40% Pokdarwis tidak aktif (24 Desa Wisata Tidak aktif dari 60 jumlah Pokdarwis	Potensi lokal terabaikan
9	Fasilitas CHSE belum lengkap	60% destinasi tanpa fasilitas CHSE	Risiko kesehatan & keselamatan
10	Kerentanan bencana & iklim	12 destinasi rawan abrasi, 5 rawan longsor	Gangguan aktivitas wisata
11	Daya saing rendah	Peringkat daya saing NTB: 8/10 provinsi	Persaingan kalah

### 2.2.3 Isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang Relevan

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, terdapat sejumlah isu lingkungan strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sektor pariwisata. Isu-isu ini penting untuk menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pariwisata agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Isu-isu tersebut meliputi:

1. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, banyak destinasi wisata berada di wilayah rawan bencana seperti pantai, perbukitan, dan lereng, yang rentan terhadap abrasi, longsor, kekeringan, serta cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Kondisi ini menuntut adanya integrasi strategi mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi.
2. Degradasi lingkungan akibat tekanan wisata, lonjakan kunjungan wisatawan tanpa pengaturan kapasitas (carrying capacity) berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, terutama pada destinasi alam dan pantai

yang populer. Hal ini dapat mengurangi daya tarik destinasi dan mengancam keberlanjutannya.

3. Pengelolaan limbah dan pencemaran, minimnya fasilitas pengelolaan limbah padat dan cair di kawasan wisata mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya di destinasi pantai, desa wisata, dan kawasan pedesaan. Sampah plastik menjadi permasalahan dominan yang merusak estetika dan ekosistem.
4. Ketimpangan sosial dan akses ekonomi, dampak positif pariwisata belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa wisata terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata.
5. Pengelolaan kawasan wisata yang belum berbasis daya dukung lingkungan, belum diterapkannya sistem pembatasan kapasitas pengunjung dan pengaturan zonasi sesuai daya dukung lingkungan di sebagian besar destinasi. Hal ini menimbulkan risiko degradasi lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

**Tabel 2. 12 Isu KLHS yang Relevan dengan Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

No	Isu KLHS	Keterkaitan dengan Pariwisata
1	Kerentanan bencana & iklim	Ancaman abrasi, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem di destinasi wisata pantai, bukit, dan lereng
2	Degradasi lingkungan	Penurunan kualitas lingkungan di destinasi padat kunjungan akibat tidak adanya manajemen kapasitas
3	Pengelolaan daya dukung	Belum ada sistem pembatasan kapasitas pengunjung dan pengaturan zonasi di sebagian besar destinasi
4	Pengelolaan limbah	Sampah plastik dan limbah cair belum tertangani dengan baik, menurunkan kualitas estetika dan ekosistem
5	Ketimpangan akses ekonomi	Dampak ekonomi pariwisata belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan desa wisata terpencil

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, 2024.

#### 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional)

Lingkungan strategis sektor pariwisata terus mengalami perubahan seiring perkembangan global, nasional, dan regional. Perubahan ini mempengaruhi arah kebijakan, strategi pemasaran, dan pengelolaan destinasi di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hasil identifikasi, isu-isu lingkungan dinamis yang relevan bagi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

## 1. **Skala Global**

Pada tingkat global, tren pariwisata semakin mengarah pada pariwisata hijau (green tourism) dan berbasis pengalaman (experience-based tourism), di mana wisatawan mencari destinasi yang menawarkan pengalaman autentik, interaktif, dan ramah lingkungan. Kompetisi antar destinasi di dunia semakin ketat, memaksa daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi produk wisata, dan pengelolaan destinasi. Selain itu, perkembangan teknologi digital seperti big data, artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), dan virtual reality (VR) menjadi bagian penting dalam promosi, manajemen, dan pengalaman wisata. Tuntutan destinasi untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan juga semakin kuat sebagai respon terhadap krisis iklim global.

## 2. **Skala Nasional**

Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia menargetkan kontribusi sektor pariwisata sebesar 6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kabupaten Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur, promosi, dan penyelenggaraan event berskala internasional. Branding destinasi nasional juga diarahkan untuk memperkuat citra pariwisata Indonesia di pasar global, serta selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor pariwisata.

## 3. **Skala Regional**

Pada skala regional, Kabupaten Lombok Tengah berada di pusat Kawasan Pengembangan Pariwisata Mandalika dan destinasi pendukung di sekitarnya. Persaingan antarwilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin ketat dalam menarik wisatawan dan investasi, mendorong perlunya inovasi dan diferensiasi produk wisata. Penguatan jejaring event lintas daerah menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan. Selain itu, sinkronisasi program pariwisata dengan

kebijakan lingkungan daerah menjadi keharusan agar pembangunan sektor ini tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dengan memahami dinamika ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.

### **2.2.5 Isu Strategis Dinas Pariwisata 2025–2029**

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi pariwisata kelas nasional dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kekayaan wisata alam, budaya, ekonomi kreatif, dan desa wisata unggulan. Namun, hasil evaluasi kinerja sektor pariwisata tahun 2020–2024 menunjukkan masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup signifikan antara capaian aktual dan target RPJMD maupun target nasional, antara lain pada indikator jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB, serta kualitas dan kompetensi SDM pariwisata.

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan dalam empat klaster utama, yaitu:

1. Pemulihan dan Daya Saing, yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kunjungan dan daya saing destinasi pascapandemi.
2. Diversifikasi dan Produk Wisata, yang menyoroti dominasi wisata alam serta terbatasnya inovasi berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
3. Infrastruktur dan SDM, yang mencerminkan ketimpangan fasilitas destinasi dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia pariwisata.
4. Keberlanjutan dan Tata Kelola, yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan, promosi digital, serta partisipasi masyarakat.
5. Perumusan isu strategis ini dilakukan melalui proses analisis terintegrasi yang mengaitkan potensi daerah, permasalahan faktual, isu KLHS, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap isu strategis yang dirumuskan mencerminkan kondisi riil, menunjukkan adanya kesenjangan capaian,

serta relevan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan daerah.

Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD (UMUM-TEKNIS) + GAP TARGET	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (Pernyataan Kebijakan)
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata daerah, termasuk integrasi destinasi utama Mandalika dengan destinasi pendukung.	Kunjungan wisatawan 2024 mencapai ±1,8 juta orang, belum memenuhi target RPJMD Provinsi NTB 2024 sebesar 2,5 juta (gap ±28%), terutama pada segmen wisatawan mancanegara akibat pemulihan pasar global yang belum optimal.	Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Kerentanan destinasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang berpotensi menurunkan keberlanjutan daya tarik wisata.	Target nasional kontribusi pariwisata terhadap PDB	Integrasi destinasi Mandalika dan destinasi pendukung di sekitarnya	1. Perlu percepatan pemulihan dan penguatan daya saing destinasi pariwisata melalui integrasi kawasan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan pasar wisatawan mancanegara secara berkelanjutan
Kekayaan budaya (desa adat, tradisi lokal, seni pertunjukan) dan ekonomi kreatif (tenun, kerajinan, kuliner)	Produk wisata didominasi alam (70% paket wisata), belum diversifikasi; kontribusi ekraf lokal terhadap PDRB < 2% (target nasional 7,5%)	Degradasi lingkungan dan tekanan sosial-budaya akibat pemanfaatan pemanfaatan pariwisata yang belum berkelanjutan.	Kompetisi global antar destinasi pascapandemi	Penetapan Mandalika sebagai destinasi super prioritas	Persaingan destinasi antarwilayah NTB	2. Perlu diversifikasi produk wisata dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan pemerataan manfaat ekonomi pariwisata
Desa wisata unggulan dan peran komunitas lokal pariwisata	Sebanyak ±35% desa wisata belum didukung akses jalan dan sarana dasar memadai, menyebabkan ketimpangan kualitas destinasi.	Pengembangan kawasan belum sepenuhnya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Isu perubahan iklim dan tuntutan karbon netral	Dukungan lintas kementerian untuk KEK Mandalika	Penyesuaian regulasi daerah berbasis daya saing lokal	3. Perlu peningkatan pemerataan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung pariwisata desa secara bertahap dan berbasis daya dukung lingkungan.
Potensi SDM lokal di sektor pariwisata	±60% pelaku pariwisata belum bersertifikat kompetensi; terdapat disparitas kapasitas SDM antarwilayah.	Ketimpangan akses ekonomi dan kesempatan kerja berkualitas	Transformasi digital industri pariwisata	Sertifikasi dan pelatihan vokasional SDM pariwisata	Tantangan peningkatan kapasitas SDM daerah	4. Perlu peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
Keberagaman destinasi yang belum dipromosikan optimal	Hanya 4 destinasi memiliki promosi digital aktif; kontribusi kunjungan dari kanal digital < 10% total wisatawan	Minimnya pengelolaan limbah kawasan wisata	Adopsi teknologi dalam pariwisata (big data, AR/VR)	Penguatan branding dan pemasaran destinasi	Perluasan jangkauan promosi destinasi NTB	5. Perlu memperkuat digitalisasi promosi dan sistem informasi destinasi pariwisata untuk meningkatkan jangkauan pasar dan efektivitas pemasaran
Destinasi padat	Belum ada sistem	Tekanan	Tuntutan	Agenda nasional	Sinkronisasi	6. Perlu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD (UMUM-TEKNIS) + GAP TARGET	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (Pernyataan Kebijakan)
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pengunjung berisiko lingkungan	manajemen daya dukung; kasus sampah di 3 destinasi utama > 2 ton/hari	terhadap lingkungan dan kapasitas daya dukung	destinasi ramah lingkungan	pembangunan berkelanjutan	program pariwisata dan lingkungan daerah	mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan daya dukung lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata
Potensi event berskala internasional dan budaya lokal	Hanya 2 event tahunan berstandar nasional; rata-rata kunjungan event < 50% kapasitas target	Manfaat ekonomi event belum inklusif bagi masyarakat lokal.	Kebutuhan diferensiasi produk dan event tourism	Peningkatan event nasional dan branding Mandalika	Perluasan jejaring event antar daerah	7. Perlu meningkatkan kapasitas penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional sebagai media promosi dan penggerak ekonomi lokal
Peran penting komunitas dan Pokdarwis	±40% Pokdarwis tidak aktif; partisipasi masyarakat <60%.	Ketimpangan manfaat ekonomi antarwilayah dan kelompok masyarakat	Tuntutan inklusivitas dan pemberdayaan	Prioritas pemberdayaan desa wisata	Ketimpangan pembangunan antardesa	8. Perlu penguatan peran, kapasitas, dan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara inklusif.
Tujuan pembangunan wisata aman dan sehat	±60% destinasi belum memenuhi standar CHSE; belum tersedia SOP evakuasi di destinasi rawan.	Risiko keselamatan, kesehatan, dan bencana di kawasan wisata	Standar layanan wisata pascapandemi	Implementasi CHSE di destinasi nasional	Sinkronisasi protokol wisata di NTB	9. Perlu penguatan penerapan standar CHSE dan sistem mitigasi risiko bencana di seluruh destinasi pariwisata..
Lokasi wisata di zona rawan bencana	12 destinasi di zona abrasi, 5 di zona longsor; belum ada rencana adaptasi iklim	Kawasan wisata rawan abrasi, longsor, kekeringan	Ancaman iklim terhadap destinasi alam	Adaptasi iklim dalam sektor pariwisata nasional	Rencana aksi daerah perubahan iklim	10. Perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan adaptasi destinasi pariwisata terhadap risiko bencana dan perubahan iklim
Posisi strategis namun kompetitif	Indeks daya saing pariwisata NTB 2024 berada di peringkat 8/10 provinsi, menunjukkan gap promosi dan infrastruktur	Kesenjangan promosi dan infrastruktur antarwilayah	Kompetisi global dan regional pariwisata	Daya saing pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional	Persaingan intra-provinsi dalam menarik wisatawan	11. Perlu penguatan daya saing dan posisi strategis pariwisata Lombok Tengah dalam jejaring pariwisata regional dan nasional.

Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, kesenjangan capaian kinerja, serta keterkaitan isu global, nasional, regional, dan isu strategis KLHS, dapat disimpulkan bahwa isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan pada percepatan pemulihan dan penguatan daya saing pariwisata daerah secara berkelanjutan.

Fokus isu strategis tersebut menitikberatkan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penguatan daya saing destinasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, guna meningkatkan mutu layanan, profesionalisme pelaku, serta ketahanan sektor pariwisata terhadap dinamika global;
2. Diversifikasi dan pengembangan produk pariwisata berbasis budaya lokal dan ekonomi kreatif, sebagai upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dan perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat;
3. Peningkatan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas antar destinasi pariwisata, khususnya pada kawasan desa wisata dan destinasi pendukung, untuk mengurangi ketimpangan kualitas layanan;
4. Penguatan promosi, pemasaran digital, dan branding destinasi pariwisata, melalui pemanfaatan teknologi informasi guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efektivitas promosi; dan
5. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungan, dengan mengintegrasikan prinsip daya dukung, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kelima fokus isu strategis tersebut selanjutnya menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pada Bab III Rencana Strategis Tahun 2025–2029, dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah menuju “Pariwisata Lombok Tengah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.”

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025–2029**

Penetapan tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Mempertimbangkan kondisi perangkat daerah yang ada saat ini, maka Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah cukup memiliki satu (1) tujuan utama. Apabila perangkat daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah tetap satu dengan mengintegrasikan kedua urusan dimaksud, sementara sasarannya dapat disesuaikan dengan masing-masing urusan yang diampu.

Tujuan Renstra PD disusun dalam bentuk kalimat kondisi yang mencerminkan hasil antara (*intermediate outcome*), dapat diukur untuk jangka waktu lima tahun, menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

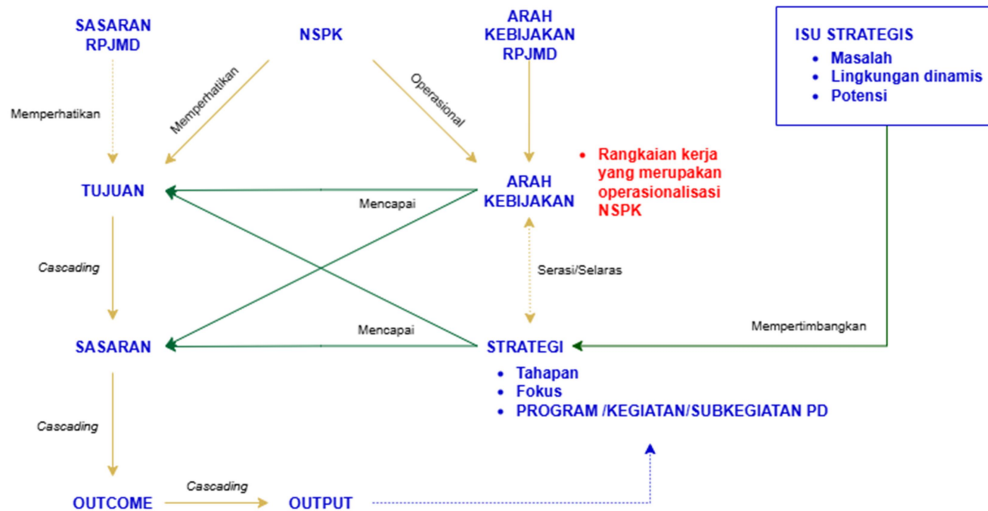
Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”**

Tujuan ini menjadi arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, diperlukan pemahaman mengenai posisi dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran RPJMD yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, serta kegiatan selama periode lima tahun.

Untuk menggambarkan hubungan tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah berikut.



**Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah**

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis sebagai dokumen operasional RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun. Dengan demikian, seluruh kegiatan dan program Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah harus berorientasi pada pencapaian sasaran RPJMD serta mendukung arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah secara konsisten dan terukur

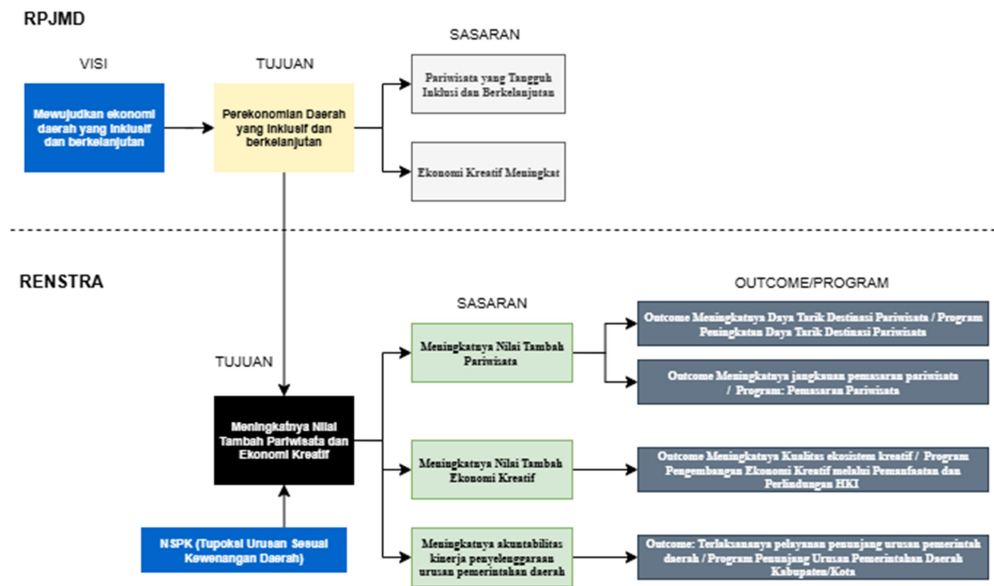
### 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata 2025–2029

Sasaran Renstra merupakan penjabaran yang lebih operasional dari tujuan Renstra dan bersifat lebih terukur, terfokus, serta mencerminkan hasil antara (intermediate outcome) yang diharapkan dapat dicapai selama periode lima tahun.

Perumusan sasaran ini mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Sebelum menetapkan sasaran secara spesifik, penting untuk memahami hubungan hierarkis antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Hubungan ini menggambarkan keterkaitan logis dari tingkat

kebijakan makro daerah hingga implementasi teknis pada perangkat daerah. Hubungan tersebut digambarkan pada Gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3. 2 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah**

Gambar 3.2 menjelaskan bahwa sasaran Renstra Dinas Pariwisata merupakan turunan langsung dari sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, yang kemudian dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan secara operasional dalam Renja Dinas Pariwisata setiap tahun. Dengan keterkaitan ini, maka pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dipastikan berjalan secara sinkron, terarah, dan terukur sesuai prioritas pembangunan daerah. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan sasaran spesifik Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata**

Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, diversifikasi produk wisata, peningkatan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi digital.

**b. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**

Sasaran ini fokus pada peningkatan kontribusi subsektor ekonomi kreatif (seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, dan desain) terhadap PDRB daerah, melalui penguatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses pasar, dan inovasi produk.

**c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Pariwisata dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diukur antara lain melalui peningkatan nilai SAKIP.

### **3.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisi langkah-langkah atau upaya optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus prioritas, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi yang digunakan antara lain:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penataan sarana, prasarana, dan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability).
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan usaha.
3. Mendorong investasi dan kolaborasi lintas sektor melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan big data untuk perencanaan, promosi, dan pemasaran pariwisata.
5. Memperkuat tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Rangkuman keterkaitan antara NSPK, tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2030 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas  
Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA</b>											
Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,34	1,47	1,59	1,69	1,78	1,86	1,95	
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	52,70	53,20	53,71	54,22	55,25	56,31	57,38	
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	734.317.718.800	801.247.938.300	916.019.427.929	1.058.503.775.620	1.189.129.441.486	1.337.065.691.014	1.500.123.758.357	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	60,33	75,87	80,01	81,57	82,03	82,62	84,39	

Tabel 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan langsung antara NSPK dan sasaran RPJMD dengan tujuan serta sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama untuk memastikan arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selaras dengan prioritas nasional dan daerah.

### 3.4 Penahapan Renstra PD

Penahapan pembangunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran berlangsung secara bertahap, terukur, dan konsisten sesuai prioritas pembangunan daerah. Setiap tahap mencerminkan fokus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan, kondisi eksisting, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Penahapan ini juga memperhatikan kesinambungan antara pemulihan pascapandemi, peningkatan daya saing, transformasi digital, serta penguatan keberlanjutan pengelolaan destinasi dan ekosistem ekonomi kreatif. Dengan demikian, rencana pembangunan lima tahunan ini diharapkan mampu:

1. Mengawali periode dengan konsolidasi dan pemulihan sektor pariwisata dan ekraf yang terdampak pandemi.

2. Mendorong percepatan investasi dan memperkuat branding destinasi unggulan.
3. Melakukan diversifikasi produk wisata dan ekraf, serta mengembangkan kawasan strategis pariwisata.
4. Meningkatkan daya saing melalui pengelolaan berbasis digital dan inovasi pemasaran.
5. Mengoptimalkan nilai tambah sektor pariwisata dan ekraf secara berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

Rincian penahapan pembangunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada **Tabel 3.2** berikut.

**Tabel 3. 2 Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029**

Penahapan	Tahap I(2026)	Tahap II(2027)	Tahap III(2028)	Tahap IV(2029)	Tahap V(2030)
Fokus Pembangunan	Konsolidasi dasar dan pemulihan destinasi serta pelaku ekraf pascapandemi	Peningkatan investasi pariwisata & penguatan branding destinasi unggulan	Diversifikasi produk wisata & ekraf; pengembangan kawasan strategis	Peningkatan daya saing pariwisata & nilai tambah ekraf berbasis digital	Optimalisasi nilai tambah dan keberlanjutan sektor pariwisata & ekraf
Destinasi & Infrastruktur	Rehabilitasi sarana destinasi; dukungan akses prioritas	Revitalisasi destinasi unggulan dan desa wisata	Pengembangan KSP dan destinasi alternatif	Penataan destinasi berkelanjutan dan kawasan wisata terpadu	Standarisasi dan penguatan infrastruktur berwawasan lingkungan
Investasi & Daya Tarik	Identifikasi peluang investasi; promosi awal ke pelaku usaha	Fasilitasi dan insentif investasi swasta	Sinergi investasi dengan pelaku lokal dan BUMDes	Ekspansi investasi melalui kerjasama regional/nasional	Optimalisasi investasi digital & wisata kreatif
Ekonomi Kreatif	Pendataan dan penguatan kelembagaan pelaku ekraf	Pelatihan dan fasilitasi legalitas serta HKI ekraf	Promosi dan digitalisasi pemasaran produk ekraf	Integrasi ekraf dalam paket wisata dan event	Pengembangan pusat ekraf dan jejaring global
SDM & Tata Kelola	Peningkatan kapasitas ASN dan pelaku wisata-ekraf	Standarisasi kompetensi pelaku pariwisata dan ekraf	Penilaian kinerja dan peningkatan manajemen destinasi	Penguatan pengawasan dan pelaporan kinerja	Evaluasi menyeluruh dan reorientasi strategi berkelanjutan
Digitalisasi & Promosi	Penyusunan master plan promosi dan sistem digital	Aktivasi kanal digital dan kalender event	Peningkatan citra destinasi melalui media nasional & internasional	Kolaborasi digital platform dan media influencer	Integrasi promosi pariwisata-ekraf dalam satu platform NTB

Lokus pengembangan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah disusun berdasarkan wilayah pengembangan pariwisata dan kecamatan

potensial, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Fokus pengembangan wilayah diarahkan pada:

1. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Mandalika — sebagai pusat destinasi unggulan nasional.
2. Kawasan Tengah (Kecamatan Praya dan sekitarnya) — sebagai pusat event budaya dan ekonomi kreatif.
3. Kawasan Utara (Kecamatan Kopang, Batukliang) — sebagai pengembangan wisata alam dan desa wisata.
4. Kawasan Selatan (Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya) — sebagai destinasi pantai dan wisata olahraga (sport tourism).
5. Kawasan Timur (Kecamatan Janapria, Pringgarata) — sebagai kawasan wisata agro dan kuliner.

### 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD

Arah kebijakan Renstra PD merupakan penjabaran operasional dari NSPK serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Rangkaian kebijakan ini menjadi panduan teknis dalam implementasi strategi dan pencapaian sasaran Renstra PD.

**Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK Kemenparekraf	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata 2025–2029	Keterangan
1	<p><b>Norma:</b> Pariwisata berkelanjutan, inklusif, berbasis masyarakat.</p> <p><b>Standar:</b> SNDP, Panduan Desa Wisata Berkelanjutan, CHSE.</p> <p><b>Prosedur:</b> Sertifikasi SDM &amp; pelaku usaha, penetapan DTW.</p> <p><b>Kriteria:</b> Destinasi layak promosi, desa wisata bersertifikat.</p>	Pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional melalui pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim	Penguatan ekosistem destinasi pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan melalui pengelolaan destinasi prioritas dan desa wisata berbasis daya dukung lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.	Menegaskan orientasi keberlanjutan destinasi dan kesesuaian KLHS..
2	<p><b>Norma:</b> Ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan teknologi.</p> <p><b>Standar:</b> SKKNI, Pedoman Ekraf, Panduan Branding Digital.</p> <p><b>Prosedur:</b> Fasilitasi HKI, pendataan &amp; pembinaan pelaku</p>	Pembangunan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi wisata prioritas kabupaten dengan KEK Mandalika.	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi wisata prioritas kabupaten dan kawasan penyangga KEK Mandalika melalui penguatan perencanaan dan fasilitasi infrastruktur pendukung pariwisata.	Fokus peran fasilitatif PD, bukan konstruksi fisik.

No	Operasionalisasi NSPK Kemenparekraf	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata 2025–2029	Keterangan
	ekraf. <b>Kriteria:</b> Unit ekraf layak promosi, HKI terdaftar.			
3		Penguatan akses wisatawan melalui multimoda dari dan menuju destinasi prioritas kabupaten dan KEK Mandalika.	Penguatan aksesibilitas wisatawan menuju dan antar destinasi prioritas melalui integrasi sistem transportasi dan informasi perjalanan pariwisata	Sinkron dengan kewenangan sektor lain.
4		Pembinaan, pengembangan, dan standarisasi desa wisata pada destinasi prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika.	Pembinaan, pengembangan, dan standarisasi desa wisata unggulan dan desa wisata berkembang pada destinasi prioritas dan kawasan penyangga KEK Mandalika.	Menjadi basis program desa wisata.
5		Pembinaan, pengembangan, dan standarisasi pelaku jasa usaha pariwisata pada destinasi prioritas kabupaten dan KEK Mandalika.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata melalui pembinaan dan sertifikasi kompetensi.	Dasar IKU SDM pariwisata.
6		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata.	Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis digital melalui pemanfaatan TIK dan sistem informasi destinasi.	Dasar program pemasaran digital
7		Penataan dan pembangunan fasilitas penunjang dan amenitas pada destinasi wisata prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika.	Penataan dan peningkatan kualitas fasilitas penunjang dan amenitas pariwisata pada destinasi prioritas dan desa wisata.	Diselaraskan dengan batas kewenangan daerah.
8		Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra pariwisata daerah.	Penguatan pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan daya tarik pariwisata daerah	Penguatan branding berbasis budaya.
9		Mengembangkan destinasi pariwisata baru berbasis keunikan alam dan budaya daerah	Pengembangan dan penataan destinasi pariwisata baru berbasis keunikan alam dan budaya lokal secara selektif dan berkelanjutan.	Menghindari ekspansi tidak terkendali.
10		Pengembangan desa wisata unggul dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang adaptif, kreatif, dan inovatif.	Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan lokal dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata secara adaptif, kreatif, dan inovatif.	Basis penguatan Pokdarwis.
11		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan, sumber daya,	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui	Sinkron dengan sasaran ekraf RPJMD

No	Operasionalisasi NSPK Kemenparekraf	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata 2025–2029	Keterangan
		dan kearifan budaya lokal.	pengembangan sentra ekraf, integrasi dengan pariwisata, dan peningkatan akses pasar.	
12		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif.	Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan penguatan kewirausahaan kreatif.	Menjadi dasar program pelatihan ekraf.
13		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual.	Fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif daerah.	Dasar subkegiatan fasilitasi HKI.

**Sumber:** NSPK Kemenparekraf, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Secara umum, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 melaksanakan lima program utama sebagai instrumen pencapaian sasaran pembangunan daerah pada bidang Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Program-program tersebut disusun untuk memastikan keterpaduan antara penguatan tata kelola perangkat daerah, pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

##### **a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan destinasi pariwisata daerah. Fokus kebijakan program mencakup penguatan pengelolaan destinasi wisata prioritas dan desa wisata melalui penataan dan peningkatan kualitas fasilitas penunjang, pelestarian daya tarik wisata alam dan budaya, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, kebencanaan, dan perubahan iklim. Program ini juga mendukung pengembangan destinasi unggulan berbasis potensi lokal guna meningkatkan kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan estetika kawasan destinasi.

##### **b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memperkuat citra serta posisi destinasi pariwisata Kabupaten Lombok Tengah di tingkat nasional dan internasional. Arah kebijakan program difokuskan pada penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan media promosi yang kreatif dan inovatif, serta penyelenggaraan dan dukungan kegiatan promosi dan event

kepariwisataan. Program ini dilaksanakan melalui penguatan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

c. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI**

Program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Fokus kebijakan program meliputi fasilitasi dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif, penguatan inovasi dan kualitas produk kreatif berbasis potensi lokal, serta peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui program ini diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah, daya saing produk kreatif lokal, serta perluasan akses pasar dan jejaring usaha ekonomi kreatif.

d. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini berorientasi pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan program difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kelembagaan dan jejaring pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan destinasi dan pengembangan ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

e. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan administrasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Fokus kebijakan program ini mencakup dukungan manajemen, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan umum, guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah.

Daftar program, outcome, indikator outcome, serta target kinerja dan pagu indikatif pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah selama periode perencanaan disajikan secara rinci pada Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.889.747.000,00		12.321.848.000,00		12.723.458.000,00		13.224.038.000,00		13.692.994.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.543.435.000,00		6.766.467.000,00		6.992.171.000,00		7.227.606.000,00		7.472.632.000,00	
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	66,67	100	100	6.543.435.000,00	100	6.766.467.000,00	100	6.992.171.000,00	100	7.227.606.000,00	100	7.472.632.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					443.515.000,00		458.633.000,00		473.932.000,00		489.890.000,00		500.498.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Orang)	200.526	216.569	234.313	443.515.000,00	253.526	458.633.000,00	275.449	473.932.000,00	299.695	489.890.000,00	326.671	500.498.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3,56	6,5	6,6		6,7		7,0		7,1		7,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.030.248.000,00		1.065.364.000,00		1.100.901.000,00		1.137.970.000,00		1.176.549.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaranKegiatan	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	25	25	1.030.248.000,00	25	1.065.364.000,00	50	1.100.901.000,00	50	1.137.970.000,00	50	1.176.549.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing (%)	5,6	7,13	7,25		7,34		7,43		7,68		7,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					393.297.000,00		412.962.000,00		429.480.000,00		455.249.000,00		473.459.000,00	

Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,10	0,11	0,13	393.297.000,00	0,15	412.962.000,00	0,18	429.480.000,00	0,21	455.249.000,00	0,23	473.459.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.479.252.000,00		3.618.422.000,00		3.726.974.000,00		3.913.323.000,00		4.069.856.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (%)	23,7	10,7	12,4	3.479.252.000,00	14	3.618.422.000,00	15,5	3.726.974.000,00	16,9	3.913.323.000,00	18,2	4.069.856.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					11.889.747.000,00		12.321.848.000,00		12.723.458.000,00		13.224.038.000,00		13.692.994.000,00	

Tabel 4.1 menyajikan program perangkat daerah beserta indikator outcome, baseline, target kinerja, dan pagu indikatif pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu Tahun 2026–2030 sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyusunan program dan target kinerja tersebut merupakan bentuk penjabaran dari sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada sasaran Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program yang direncanakan mencerminkan keterpaduan antara upaya penguatan tata kelola internal perangkat daerah, pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan efektivitas pemasaran pariwisata, penguatan ekosistem ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Seluruh program dirancang dengan pendekatan berbasis outcome guna memastikan bahwa alokasi anggaran yang disediakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

## 4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III Rencana Strategis, setiap program dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan subkegiatan. Uraian kegiatan ini menggambarkan arah operasional pelaksanaan program prioritas Dinas Pariwisata selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan implementasi teknis tahunan.

### 1. Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah melalui penguatan tata kelola destinasi, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, serta pengembangan dan penataan destinasi sesuai dengan standar nasional pariwisata dan prinsip CHSE.

Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

- a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan daya tarik wisata unggulan melalui penetapan, perencanaan, dan pengembangan daya tarik wisata berbasis potensi lokal. Bertujuan meningkatkan kualitas destinasi wisata agar lebih menarik, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan.
- b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, yang diarahkan pada penguatan kapasitas pengelola dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, khususnya pada kawasan prioritas dan wilayah penyangga.
- c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, yang berfokus pada peningkatan tata kelola destinasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi sesuai standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability).

## **2. Program: Pemasaran Pariwisata**

Program Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata daerah, memperkuat citra dan daya saing destinasi, serta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, yang mencakup penyediaan data dan informasi pariwisata, penguatan promosi melalui berbagai media, serta peningkatan kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

## **3. Program: Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI**

Program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pariwisata. Fokus program ini adalah mendorong inovasi, kreativitas, serta perlindungan karya dan produk kreatif daerah.

Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah, guna mendukung kolaborasi dan pengembangan inovasi ekonomi kreatif.
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, yang diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan dan strategi ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan pelaku ekonomi kreatif, pengembangan pendidikan ekonomi kreatif, serta fasilitasi pendaftaran dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

## **4. Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai faktor kunci dalam peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, yang mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif guna meningkatkan kemampuan inovasi, manajerial, dan kewirausahaan.

#### **5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi manajerial, administrasi, dan pelayanan internal perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata.
3. Administrasi Barang Milik Daerah  
Mengelola aset daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Memberikan dukungan administrasi, tata persuratan, dan pelayanan umum.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Menyediakan dukungan jasa operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Menjaga keberlanjutan fungsi dan kondisi sarana-prasarana pendukung kerja Dinas Pariwisata.

7. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Menjamin **ketersediaan** peralatan dan perlengkapan kerja guna mendukung pelaksanaan tugas dinas secara optimal.

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan pendekatan logical framework yang mengacu pada NSPK sektor pariwisata, sasaran RPJMD, serta kebutuhan dan potensi daerah. Pendekatan ini digunakan untuk menjamin keterkaitan yang jelas dan terukur antara tujuan, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, serta kegiatan dan subkegiatan, sehingga setiap intervensi program memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rangkaian hasil perumusan tersebut selanjutnya disajikan secara sistematis dalam Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

**Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
<b>3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA</b>							
Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Orang)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Tersusunnya dan ditetapkannya dokumen serta lokasi daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, tersedianya sarana prasarana, serta laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaranKegiatan		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya dokumen data dan informasi pariwisata, promosi, serta kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan strategi ekonomi kreatif, terlaksananya penguatan kelembagaan, serta fasilitasi kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Kreatif (Produk)		
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase SDM pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terselenggaranya pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.26.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, akurat, dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya dukungan administrasi umum yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya layanan jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Berdasarkan Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa perumusan intervensi pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berbasis kerangka logis (logical framework), dengan mengacu pada NSPK sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Perumusan dimulai dari sasaran RPJMD Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dijabarkan ke dalam tujuan strategis berupa meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan tersebut diukur melalui indikator makro sektoral, seperti rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta indikator investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, tujuan strategis tersebut diturunkan ke dalam sasaran antara yang lebih operasional, yaitu peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata, peningkatan kualitas ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dirancang untuk mendukung sasaran meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. Kegiatan dan subkegiatan pada program ini diarahkan pada penetapan dan perencanaan destinasi, penguatan kapasitas pengelola kawasan strategis, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Program Pemasaran Pariwisata disusun untuk mendukung sasaran meningkatnya jangkauan pemasaran dan pertumbuhan kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri yang mencakup penyediaan data dan informasi pariwisata, penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

Selanjutnya, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing ekosistem ekonomi kreatif daerah. Program ini mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan pelaku ekonomi kreatif, penyusunan dokumen perencanaan dan strategi ekonomi kreatif, serta fasilitasi pendaftaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif difokuskan pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan dalam program ini berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang adaptif dan berdaya saing.

Di samping program-program teknis tersebut, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berfungsi sebagai fondasi tata kelola perangkat daerah, dengan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Program ini memastikan seluruh program dan kegiatan teknis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, Tabel 4.2 menunjukkan bahwa keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah telah dirumuskan secara selaras antara sasaran RPJMD, tujuan Renstra, outcome, output, dan indikator kinerja, serta siap diturunkan ke dalam rencana kerja tahunan dan penganggaran perangkat daerah. Keterpaduan tersebut menjadi dasar bagi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata selama periode Rencana Strategis.

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator kinerja disusun secara **terukur, berjenjang, dan berorientasi hasil (outcome-based)**. Indikator kinerja daerah menggambarkan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta program, kegiatan, dan subkegiatan. Indikator ini menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan dan pengalokasian pagu indikatif pendanaan, sehingga kontribusi setiap intervensi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diukur secara jelas. Indikator kinerja daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah disajikan dalam **Tabel 4.3.1**, yang mencakup indikator **Aspek Daya Saing Daerah** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**. Indikator Aspek Daya Saing Daerah digunakan untuk mengukur dampak pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara makro, sedangkan IKK digunakan untuk mengukur kinerja utama Dinas Pariwisata yang berada dalam kewenangan langsung perangkat daerah.

Penetapan baseline dan target kinerja tahunan dilakukan secara bertahap dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, tren perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, potensi dan daya dukung daerah, serta kapasitas pendanaan. Indikator kinerja daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA										
<b>I ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,34	1,47	1,59	1,69	1,78	1,86	1,95	
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	734.317.718.800	801.247.938.300	916.019.427.929	1.058.503.775.620	1.189.129.441.486	1.337.065.691.014	1.500.123.758.357	
3	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	200.526	216.569	234.313	253.526	275.449	299.695	326.671	
<b>II INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>										
1	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	52,70	53,20	53,71	54,22	55,25	56,31	57,38	
2	Persentase pertumbuhan jumlah	%	5,6	7,13	7,25	7,34	7,43	7,68	7,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	wisatawan asing									
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	

Berdasarkan tabel indikator kinerja daerah di atas, kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah menunjukkan peningkatan bertahap kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah, yang tercermin dari kenaikan rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif, serta pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci mencerminkan fokus kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, yaitu mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata, mempercepat pertumbuhan wisatawan asing, serta memperluas perlindungan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif. Indikator-indikator tersebut berada dalam kewenangan langsung perangkat daerah dan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Target kinerja ditetapkan secara bertahap dan realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, dinamika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemampuan pendanaan daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya menjadi dasar penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target tahunan dan pagu indikatif pendanaan, sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata selama periode Rencana Strategis.

Indikator kinerja daerah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 4. 4 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.889.747.000,00		12.321.848.000,00		12.723.458.000,00		13.224.038.000,00		13.692.994.000,00			
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.543.435.000,00		6.766.467.000,00		6.992.171.000,00		7.227.606.000,00		7.472.632.000,00			
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	66,67	100	100	6.543.435.000,00	100	6.766.467.000,00	100	6.992.171.000,00	100	7.227.606.000,00	100	7.472.632.000,00			
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					79.000.000,00		92.000.000,00		97.500.000,00		103.000.000,00		221.000.000,00			
Outcome : Meningkatkan kualitas dan kepatuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100		100		100		100		100				
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	1	79.000.000,00	1	92.000.000,00	1	97.500.000,00	1	103.000.000,00	1	221.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	(Dokumen)															
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00			
3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00		
3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00		
3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00		
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	19.000.000,00		
3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	20.000.000,00		
3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.26.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	125.000.000,00		
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.739.435.000,00		5.776.967.000,00		5.967.171.000,00		6.097.106.000,00		6.124.132.000,00		
Meningkatnya kualitas dan kepatuhan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akurat, dan tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	100		100		100		100		100			
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, akurat, dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	59	59	5.739.435.000,00	59	5.776.967.000,00	59	5.967.171.000,00	59	6.097.106.000,00	59	6.124.132.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18		18		18		18		18			
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.633.435.000,00		5.660.467.000,00		5.840.171.000,00		5.959.606.000,00		5.976.132.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	59	59	5.633.435.000,00	59	5.660.467.000,00	59	5.840.171.000,00	59	5.959.606.000,00	59	5.976.132.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Orang/bulan)														
3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	100.000.000,00	18	110.000.000,00	18	120.000.000,00	18	130.000.000,00	18	140.000.000,00		
3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Outcome : Terselenggaranya manajemen aset dan barang milik daerah secara tertib administrasi	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah dengan ketentuan	100	100	100		100		100		100		100			
Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00		
3.26.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00		
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					507.500.000,00		645.000.000,00		645.000.000,00		715.000.000,00		785.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kecukupan dukungan administrasi umum dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselenggaranya dukungan administrasi umum yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	507.500.000,00	10	645.000.000,00	10	645.000.000,00	10	715.000.000,00	10	785.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	12		14		16		18		20			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10		10		10		10		10			
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					200.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	200.000.000,00	10	240.000.000,00	10	240.000.000,00	10	260.000.000,00	10	280.000.000,00		
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					152.500.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	152.500.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	225.000.000,00	10	250.000.000,00		
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	12	150.000.000,00	14	200.000.000,00	16	200.000.000,00	18	225.000.000,00	20	250.000.000,00		
3.26.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya keandalan dan kontinuitas layanan penunjang operasional perangkat daerah	Tingkat ketersediaan layanan komunikasi dan utilitas perangkat daerah	100	100	100			100		100		100		100		
Tersedianya layanan jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00		
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00		
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		
Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas dan sarana operasional perangkat daerah agar tetap layak fungsi dan siap pakai	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	100	100	100			100		100		100		100		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	24	24	24	200.000.000,00	24	225.000.000,00	24	250.000.000,00	24	275.000.000,00	24	300.000.000,00		
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	24	24	24	200.000.000,00	24	225.000.000,00	24	250.000.000,00	24	275.000.000,00	24	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					443.515.000,00		458.633.000,00		473.932.000,00		489.890.000,00		500.498.000,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Orang)	200.526	216.569	234.313	443.515.000,00	253.526	458.633.000,00	275.449	473.932.000,00	299.695	489.890.000,00	326.671	500.498.000,00	3.26.0.00.0.00.23.000 - DINAS PARIWISATA	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3,56	6,5	6,6		6,7		7,0		7,1		7,3			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					103.653.027,00		105.633.000,00		115.000.000,00		121.000.000,00		123.000.000,00		
Outcome : Meningkatkan jumlah dan kualitas daya tarik wisata yang memenuhi standar kelayakan dan berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar kelayakan dan berdaya saing	NA	NA	20		40		60		80		100			
Tersusunnya dan ditetapkannya dokumen serta lokasi daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	NA	1	103.653.027,00	2	105.633.000,00	3	115.000.000,00	4	121.000.000,00	5	123.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	NA	1		2		3		4		5			
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					53.885.912,00		54.000.000,00		60.000.000,00		64.000.000,00		65.000.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	NA	NA	1	53.885.912,00	2	54.000.000,00	3	60.000.000,00	4	64.000.000,00	5	65.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					49.767.115,00		51.633.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	NA	NA	1	49.767.115,00	2	51.633.000,00	3	55.000.000,00	4	57.000.000,00	5	58.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					73.437.200,00		76.000.000,00		77.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Outcome : Meningkatkan tata kelola kawasan strategis pariwisata	Persentase pengelola kawasan strategis pariwisata yang kompeten	NA	NA	40		60		80		100		100			
Terselenggaranya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	NA	NA	25	73.437.200,00	30	76.000.000,00	35	77.000.000,00	40	79.000.000,00	45	80.000.000,00		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					73.437.200,00		76.000.000,00		77.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	NA	NA	25	73.437.200,00	30	76.000.000,00	35	77.000.000,00	40	79.000.000,00	45	80.000.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					266.424.773,00		277.000.000,00		281.932.000,00		289.890.000,00		297.498.000,00		
Outcome : Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase destinasi pariwisata yang memiliki dan menerapkan dokumen penetapan serta perencanaan pengelolaan sesuai standar	NA	NA	20		40		60		80		100			
Tersusunnya dokumen perencanaan, tersedianya sarana prasarana, serta laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	NA	1	266.424.773,00	1	277.000.000,00	1	281.932.000,00	1	289.890.000,00	1	297.498.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	NA	NA	1		2		3		4		5			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	NA	NA	1		2		3		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					53.127.115,00		55.000.000,00		57.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00			
Ditetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	NA	NA	1	53.127.115,00	2	55.000.000,00	3	57.000.000,00	4	59.000.000,00	5	61.000.000,00			
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					53.697.658,00		55.000.000,00		57.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00			
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	NA	NA	1	53.697.658,00	2	55.000.000,00	3	57.000.000,00	4	59.000.000,00	5	61.000.000,00			
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					150.000.000,00		155.000.000,00		154.000.000,00		156.000.000,00		158.000.000,00			
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	2	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	154.000.000,00	1	156.000.000,00	1	158.000.000,00			
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					9.600.000,00		12.000.000,00		13.932.000,00		15.890.000,00		17.498.000,00			
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	9.600.000,00	1	12.000.000,00	1	13.932.000,00	1	15.890.000,00	1	17.498.000,00			
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.030.248.000,00		1.065.364.000,00		1.100.901.000,00		1.137.970.000,00		1.176.549.000,00			
Meningkatnya jangkauan pemasaran kegiatan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing (%)	5,6	7,13	7,25	1.030.248.000,00	7,34	1.065.364.000,00	7,43	1.100.901.000,00	7,68	1.137.970.000,00	7,73	1.176.549.000,00	3.26.0.00.0.00.23.000 - DINAS PARIWISATA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	25	25		25		50		50		50				
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1.030.248.000,00		1.065.364.000,00		1.100.901.000,00		1.137.970.000,00		1.176.549.000,00			
Outcome : Meningkatkan eksposur dan visibilitas promosi pariwisata	Persentase peningkatan jangkauan promosi pariwisata daerah melalui media promosi resmi	NA		10		12		15		15		15				
Tersusunnya dokumen data dan informasi pariwisata, promosi, serta kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	1	1.030.248.000,00	1	1.065.364.000,00	1	1.100.901.000,00	1	1.137.970.000,00	1	1.176.549.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					54.250.571,00		56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00			
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		1	54.250.571,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	1	62.000.000,00			
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					35.316.894,00		37.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		42.000.000,00			
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		35.316.894,00	1	37.000.000,00	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	1	42.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				940.680.535,00		972.364.000,00		1.003.901.000,00		1.038.970.000,00		1.072.549.000,00			
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	1	940.680.535,00	1	972.364.000,00	1	1.003.901.000,00	1	1.038.970.000,00	1	1.072.549.000,00			
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				393.297.000,00		412.962.000,00		429.480.000,00		455.249.000,00		473.459.000,00			
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,10	0,11	0,13	393.297.000,00	0,15	412.962.000,00	0,18	429.480.000,00	0,21	455.249.000,00	0,23	473.459.000,00		
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00			
Outcome : Meningkatkan akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber daya dan ruang berekspresi	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan sarana dan prasarana kota kreatif	NA	10		15		15		20		30				
Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	NA	NA	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	NA	NA	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				293.297.000,00		307.962.000,00		319.480.000,00		335.249.000,00		343.459.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan ekosistem ekonomi kreatif daerah	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas usaha dan/atau terintegrasi dalam kelembagaan ekonomi kreatif daerah	NA		10		12		50		75		100			
Tersusunnya dokumen perencanaan dan strategi ekonomi kreatif, terlaksananya penguatan kelembagaan, serta fasilitasi kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	NA	NA	1	293.297.000,00	1	307.962.000,00	1	319.480.000,00	1	335.249.000,00	1	343.459.000,00		
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	NA	NA	3		5		7		9		12			
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	NA	NA	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	NA	NA	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	NA	NA	1		1		1		1		1			
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan					75.000.000,00		77.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	NA	NA	1	75.000.000,00	1	77.000.000,00	1	79.000.000,00	1	80.000.000,00	1	82.000.000,00		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					50.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		62.000.000,00		63.000.000,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	NA	NA	1	50.000.000,00	1	53.000.000,00	1	54.000.000,00	1	62.000.000,00	1	63.000.000,00		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah					50.000.000,00		55.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	NA	NA	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah					43.246.300,00		45.962.000,00		51.480.000,00		54.249.000,00		55.459.000,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	NA	NA	1	43.246.300,00	1	45.962.000,00	1	51.480.000,00	1	54.249.000,00	1	55.459.000,00		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual					75.050.700,00		77.000.000,00		79.000.000,00		81.000.000,00		83.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	NA	NA	3	75.050.700,00	5	77.000.000,00	7	79.000.000,00	9	81.000.000,00	12	83.000.000,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.479.252.000,00		3.618.422.000,00		3.726.974.000,00		3.913.323.000,00		4.069.856.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (%)	23,7	10,27	12,4	3.479.252.000,00	14	3.618.422.000,00	15,5	3.726.974.000,00	16,9	3.913.323.000,00	18,2	4.069.856.000,00	3.26.0.00.0.00.23.000 - DINAS PARIWISATA	
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					3.479.252.000,00		3.618.422.000,00		3.726.974.000,00		3.913.323.000,00		4.069.856.000,00		
Outcome : Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas dan profesionalisme usaha			40		45		50		65		80			
Terselenggaranya pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	327	NA	150	3.479.252.000,00	180	3.618.422.000,00	210	3.726.974.000,00	240	3.913.323.000,00	270	4.069.856.000,00		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					3.479.252.000,00		3.618.422.000,00		3.726.974.000,00		3.913.323.000,00		4.069.856.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	327	120	150	3.479.252.000,00	180	3.618.422.000,00	210	3.726.974.000,00	240	3.913.323.000,00	270	4.069.856.000,00		



Tabel di atas memuat rincian keterpaduan antara program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target capaian tahunan, dan pagu indikatif selama periode Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja dan penganggaran, sekaligus memberikan dasar pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berjenjang.

Penetapan besaran dan nilai target kinerja setiap tahun pada masing-masing indikator disusun secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan baseline kinerja tahun 2024, tren capaian kinerja pada periode sebelumnya, serta proyeksi kinerja yang realistis berdasarkan ketersediaan data yang memadai dan valid. Dengan pendekatan tersebut, target kinerja tidak ditetapkan secara normatif semata, tetapi mencerminkan arah peningkatan kinerja yang konsisten dan rasional sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, baseline kinerja ditetapkan berdasarkan data capaian terakhir yang tersedia dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahunan selama periode Renstra. Sementara itu, terhadap subkegiatan yang merupakan kegiatan baru pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029, belum tersedia data capaian kinerja periode sebelumnya sehingga baseline kinerja secara kuantitatif belum dapat ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, penetapan target kinerja awal dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan urusan, ruang lingkup subkegiatan, serta kapasitas sumber daya yang tersedia, dengan menjadikan tahun pertama pelaksanaan sebagai dasar pembentukan capaian kinerja awal (initial target).

Struktur pendanaan dalam tabel diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dengan fokus pada:

1. penguatan daya tarik destinasi dan peningkatan infrastruktur pariwisata;
2. peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata yang berkelanjutan;
3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;

4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif; dan
5. dukungan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan hingga tahun 2030 disusun sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2030 diposisikan sebagai tahun transisi yang berfungsi sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2030 sekaligus sebagai penghubung menuju periode perencanaan daerah berikutnya (RPJMD 2031–2036). Dengan demikian, arah program, target kinerja, dan dukungan pendanaan pada tahun 2030 tidak hanya menutup periode Renstra 2025–2029, tetapi juga memastikan keberlanjutan capaian strategis dan konsistensi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah.

#### **4.4 Uraian Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pencapaian outcome program-program utama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan fokus pada peningkatan daya tarik destinasi, perluasan jangkauan pemasaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Rincian daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA</b>				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	DESTINASI PARIWISATA			
			3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
2.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaranKegiatan	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
3.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

Outcome program pada tabel ini merupakan sasaran program yang selaras dengan pohon kinerja dan digunakan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.

Terhadap kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, baseline kinerja ditetapkan berdasarkan data capaian terakhir yang tersedia. Sementara itu, apabila pada periode Renstra Tahun 2025–2029 terdapat subkegiatan yang bersifat baru, penetapan target kinerja awal dilakukan dengan menjadikan tahun pertama pelaksanaan sebagai dasar pembentukan capaian awal

(initial target), yang selanjutnya digunakan sebagai baseline kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, penentuan besaran dan nilai target kinerja tahunan pada setiap kegiatan dan subkegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan didukung oleh data yang memadai dan valid, sejalan dengan prinsip pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka menjamin keterukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2025–2029, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan hasil kinerja (outcome) utama perangkat daerah.

Penetapan IKU dan target kinerjanya disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2020–2024 considering tren capaian, permasalahan, serta kapasitas pengendalian kinerja perangkat daerah, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Berikut disajikan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kinerja perangkat daerah selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

**Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PARIWISATA									
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,34	1,47	1,59	1,69	1,78	1,86	1,95	
3.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	734.317.718.800	801.247.938.300	916.019.427.929	1.058.503.775.620	1.189.129.441.486	1.337.065.691.014	1.500.123.758.357	
4.	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60,33	75,87	80,01	81,57	82,03	82,62	84,39	
5.	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	52,70	53,20	53,71	54,22	55,25	56,31	57,38	

Berdasarkan Tabel 4.5, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun secara berjenjang dan berkesinambungan. Penetapan target kinerja tersebut mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya (2020–2024), hasil evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah, serta efektivitas pelaksanaan pengendalian kinerja yang telah berjalan.

Indikator Kinerja Utama berfungsi sebagai alat ukur utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja dilakukan secara sistematis melalui mekanisme monitoring triwulanan, evaluasi kinerja tahunan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah (LKjIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peningkatan Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum serta Nilai Tambah Ekonomi Kreatif mencerminkan penguatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, peningkatan persentase investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha dan daya tarik daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, pencapaian target IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Kabupaten Lombok Tengah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat regional.

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen utama pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penetapan IKK pada periode Renstra Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja periode Renstra sebelumnya (2020–2024), termasuk hasil reviu kinerja tahunan, capaian indikator, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, target IKK tidak ditetapkan secara statis, melainkan disusun secara berjenjang, progresif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IKK berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik dari aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, disajikan Tabel 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah selama periode Renstra

**Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	positif	%	52,70	53,20	53,71	54,22	55,25	56,31	57,38	
3.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	positif	%	5,6	7,13	7,25	7,34	7,43	7,68	7,73	
4.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	Persentase	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menetapkan sejumlah indikator kinerja kunci yang mencerminkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara komprehensif.

Target kinerja setiap indikator IKK disusun dengan mempertimbangkan:

1. Baseline kinerja tahun 2024 sebagai hasil akhir Renstra sebelumnya;

2. Tren capaian kinerja tahun 2020–2024, termasuk faktor penghambat dan pendukung pencapaian;
3. Kapasitas fiskal daerah dan ketersediaan sumber daya yang realistis;
4. Efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya;
5. Ketersediaan data yang memadai dan valid, yang bersumber dari perangkat daerah terkait dan instansi teknis pendukung.

Dengan pendekatan tersebut, target IKK pada periode 2025–2029 ditetapkan tidak stagnan, melainkan menunjukkan arah peningkatan yang terukur dan menantang, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

Indikator Kinerja Kunci selanjutnya digunakan sebagai instrumen utama pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dipantau secara berkala melalui:

- a. monitoring triwulanan,
- b. evaluasi kinerja tahunan,
- c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
- d. serta evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil pengukuran IKK menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan, penyempurnaan program dan kegiatan, serta reviu terhadap pelaksanaan Renstra, guna memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan Substansial**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman teknokratis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah secara terukur, akuntabel, dan berbasis hasil.

Tujuan strategis yang hendak dicapai melalui Renstra ini adalah: “Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, yang secara bertahap diwujudkan melalui tiga sasaran strategis utama, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata, yang ditujukan untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi unggulan, peningkatan investasi, diversifikasi produk wisata, dan digitalisasi promosi.
2. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif, yang berfokus pada penguatan kapasitas dan daya saing subsektor ekonomi kreatif melalui fasilitasi pelaku ekraf, inovasi produk berbasis budaya lokal, perlindungan kekayaan intelektual, serta integrasi ekraf dengan sektor pariwisata.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, sebagaimana diukur melalui peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pada setiap sasaran juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi kebencanaan, inovasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan tersebut, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen utama

dalam mengarahkan penyelenggaraan urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil (outcome-based).

Seluruh indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), telah dirumuskan sebagai alat untuk memastikan ketercapaian sasaran secara akuntabel dan transparan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan, sekaligus rujukan dalam pengintegrasian program-program pariwisata dan ekonomi kreatif ke dalam pembangunan daerah secara keseluruhan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, sinergi antarpihak, serta evaluasi berkala yang adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, ekonomi, sosial, dan teknologi di tingkat lokal, nasional, maupun global.

## **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi prinsip dasar dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta ketepatan arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Kesesuaian dan Konsistensi Perencanaan**

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dalam Renstra PD harus selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lain yang berkaitan. Selain itu, perencanaan sektoral seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) dan dokumen teknis pendukung lainnya menjadi acuan penting dalam menjaga kesesuaian arah pembangunan.

### **2. Berbasis Hasil (Result-Based Planning)**

Pelaksanaan Renstra mengedepankan pendekatan berbasis hasil, di mana indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) menjadi ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Penekanan pada outcome dan manfaat bagi masyarakat menjadi fokus utama dari pelaksanaan program/kegiatan.

3. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja, dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Pelaporan kinerja dilakukan melalui sistem yang terintegrasi seperti e-SAKIP dan e-Monev, sebagai bagian dari penguatan manajemen kinerja berbasis akuntabilitas publik.

4. **Kolaboratif dan Partisipatif**

Renstra ini mengamanatkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendekatan pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media) menjadi prinsip kerja utama dalam mendorong partisipasi aktif dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

5. **Responsif terhadap Perubahan dan Tantangan**

Dinas Pariwisata perlu memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika yang terjadi, baik berupa perubahan lingkungan strategis (seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi), maupun peluang dari transformasi digital, tren pasar wisata global, serta preferensi wisatawan yang terus berkembang. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci keberlanjutan implementasi Renstra.

### **5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

a. **Pengendalian Pelaksanaan Renstra**

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Mekanisme pengendalian mencakup:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan setiap tahun;
- b. Monitoring dan pelaporan kinerja secara triwulanan dan tahunan melalui indikator sasaran dan output kegiatan/sub kegiatan;

- c. Pemanfaatan sistem pelaporan kinerja terintegrasi seperti e-SAKIP dan e-Monev.

**b. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra**

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan hasil pelaksanaan Renstra, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk

- a. Evaluasi tahunan yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci;
- b. Evaluasi tengah periode (midterm review) yang bertujuan menyesuaikan target, sasaran, atau arah kebijakan apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi lingkungan strategis;
- c. Evaluasi akhir periode sebagai bagian dari refleksi strategis untuk mengukur capaian akhir sasaran Renstra dan menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra periode berikutnya.

**c. Prinsip Evaluasi**

Proses evaluasi kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Efektivitas: sejauh mana program/kegiatan mencapai tujuan dan sasaran;
- b. Efisiensi: pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam pelaksanaan program;
- c. Relevansi: kesesuaian program/kegiatan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat;
- d. Keberlanjutan: potensi program/kegiatan untuk memberikan manfaat jangka panjang;
- e. Dampak (impact): kontribusi nyata terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

**d. Landasan Hukum Pelaksanaan**

Seluruh proses pengendalian dan evaluasi Renstra ini dilaksanakan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- b. Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja, sebagai dasar dalam menyusun indikator kinerja dan struktur cascading kinerja.

#### **5.4 Penutup**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, dokumen ini diharapkan menjadi acuan utama dan panduan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun secara komprehensif dan berbasis pada pendekatan teknokratis, partisipatif, serta berorientasi pada hasil, dengan tetap mengacu pada visi-misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Implementasi Renstra ini diharapkan mampu:

1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
2. Meningkatkan daya saing destinasi wisata dan kontribusi ekonomi kreatif dalam struktur ekonomi daerah,
3. Menumbuhkan iklim usaha dan inovasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, serta
4. Memberikan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Pariwisata, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Dengan kolaborasi yang erat dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Tengah akan semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.
6. PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.
7. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.
8. Permenparekraf No. 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
9. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Pariwisata.
10. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (Ripparda) Kabupaten Lombok Tengah.
12. Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2020–2024.
13. Pedoman CHSE 2020–2023, Kemenparekraf.
14. Panduan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan, Kemenparekraf.

## GLOSARIUM

- Renstra: Rencana Strategis; dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah.
- RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- IKU: Indikator Kinerja Utama.
- IKK: Indikator Kinerja Kunci.
- NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.
- CHSE: Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability.
- Ekraf: Ekonomi Kreatif.
- HKI: Hak Kekayaan Intelektual.
- Pokdarwis: Kelompok Sadar Wisata.
- Destinasi Wisata: Kawasan geografis yang dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.
- Sub Kegiatan: Unit terkecil dalam struktur penganggaran dan perencanaan kegiatan pemerintahan daerah.
- Outcome: Hasil antara dari program atau kegiatan yang mencerminkan manfaat bagi masyarakat.
- Output: Hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan pemerintah

